

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu perjanjian atau dokumen kesepakatan global yang berisi pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi proses pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2015 sampai 2030.<sup>2</sup> SDGs Berurusan dengan ancaman perubahan iklim yang berdampak pada cara mengelola sumber daya alam yang rapuh, mencapai kesetaraan gender atau kesehatan yang lebih baik guna membantu memberantas kemiskinan, dan mendorong perdamaian. Adanya masyarakat yang inklusif nantinya akan dapat mengurangi ketidaksetaraan dan membantu ekonomi menjadi makmur. SDGs sendiri memiliki 4 pilar yaitu pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial dan pilar hukum. Keempat pilar tersebut masing – masing terdiri dari 17 tujuan dari SDGs. yakni Pilar lingkungan meliputi: Tujuan SDGs (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender. Kemudian pilar ekonomi meliputi: (7) energi yang bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi, dan infrastruktur; (10)

---

<sup>2</sup> United Nations Development Programm, <http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>. Akses pada 19 Januari 2023

berkurangnya kesenjangan; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Pilar selanjutnya ialah pilar sosial meliputi: (6) air bersih dan sanitasi layak; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penganganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan. Serta yang terakhir adalah pilar lingkungan dengan tujuan (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menyepakati SDGs dan berkomitmen melaksanakan ataupun mengimplementasikan dengan baik program SDGs ini. Berbagai kegiatan dan program telah di terapkan untuk menjadikan langkah-langkah strategis dalam keberhasilan SDGs. Sesuai dengan prioritas pembangunan nasional telah terdapat 4 target dan indikator SDGs yang selaras dalam rencana pembangunan jangka menengah (2015-2019), meskipun dari total 169 target yang ada di SDGs, hanya sekitar 57 persen (96 target SDGs) yang sudah terlaksana.<sup>4</sup> Sebab pada saat ini isu kemiskinan masih menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan

---

<sup>3</sup> Bappenas, "Sekilas SDGs" dalam <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/> diakses pada 28 januari 2023.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, "Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia" diakses pada 28 Januari 2023

beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai prioritas pertama. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, seperti pembangunan ekonomi.

Adanya tujuan dari pembangunan ekonomi ialah untuk meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan sebuah lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran dari pembangunan nasionalnya adalah dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena kemiskinan merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau setidaknya dapat berkurang.<sup>5</sup> Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif dengan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Meskipun pemerintah sendiri sudah mengupayakan pengendalian atas kemiskinan semenjak tahun 1998 hingga sekarang, dan juga Indonesia menyusun strategi dan program untuk menuntaskan masalah yang ada di masyarakat (kemiskinan) di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur dengan melakukan

---

<sup>5</sup> Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 232

peningkatan sumber daya manusianya dan peningkatan kinerja perekonomian, supaya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten, sehingga kehidupan masyarakat akan tertata dengan layak.<sup>6</sup>

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah “garis kemiskinan internasional”, garis tersebut tidak mengenal batas antar negara dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US \$1 atau \$2 per-hari dalam Paritas Daya Beli (PPP).<sup>7</sup> sedangkan, kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Garis kemiskinan di berbagai Negara tidak seragam, dan berubah menurut tingkat pendapatan atau tahap pembangunan ekonomi dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 179

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 232

sosial suatu Negara. Pengertian garis kemiskinan adalah tingkat konsumsi minimal atau tingkat pengeluaran atau pendapatan yang memungkinkan orang biasa dapat hidup.<sup>8</sup> Pada saat ini masih banyak penduduk yang pendapatannya hanya sedikit di atas batas garis kemiskinan. Kelompok yang termasuk dalam nyaris miskin ini sangat rawan terhadap perubahan keadaan ekonomi seperti kenaikan harga komoditi-komoditi utama atau turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Garis kemiskinan di Indonesia secara luas digunakan pertama kali dikenalkan oleh Sajogyo pada tahun 1964 yang diukur berdasarkan konsumsi setara beras per tahun. Terdapat tiga ukuran garis kemiskinan yaitu miskin, sangat miskin dan melarat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita per tahun setara beras sebanyak 480 kg, 360 kg dan 270 kg untuk daerah perkotaan dan 320 kg, 240 kg dan 180 kg untuk daerah pedesaan.<sup>9</sup>

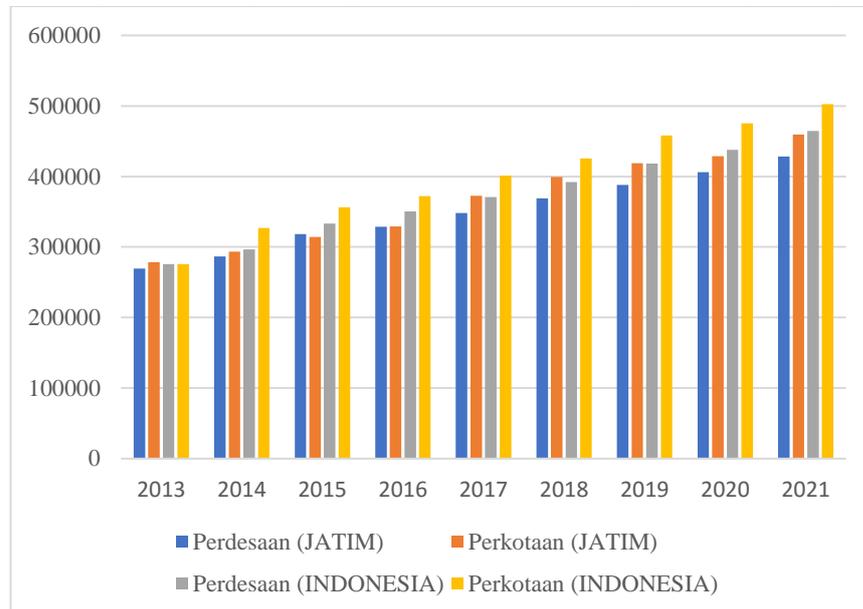
Adapun grafik garis kemiskinan di Jawa Timur dan Indonesia ditinjau di tingkat pedesaan dan perkotaan pada periode tahun 201 – 2021 sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Shinichi Ichimura, *Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta : UIPress, 1989), hal. 338

<sup>9</sup> Sajogyo, *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Pangan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hal 2

**Gambar 1.1**  
**Garis Kemiskinan Jawa Timur dan Indonesia 2013 - 2021**



Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 tentang garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada tahun 2013 – 2021 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bertambahnya angka garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ialah pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan indeks pembangunan manusia. Pada tahun 2013 garis kemiskinan perdesaan di Jawa Timur masih berada di angka Rp 269.294 dan garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp 278.653. Pada tahun tersebut angka garis kemiskinan Indonesia masih sama dengan garis kemiskinan di Jawa Timur. Hingga pada tahun 2015 angka garis kemiskinan perdesaan di Jawa Timur mengalami kenaikan lebih besar dibanding perkotaan, yakni Rp 318.443 untuk perdesaan, dan Rp 314.320 untuk perkotaan. Seiring

berjalannya waktu dari tahun ke tahun, garis kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun 2017 garis kemiskinan perkotaan di Indonesia sudah mencapai angka Rp 400.995 sedangkan di Jawa Timur masih berada pada Rp 372.585. Hal ini terus bertambah hingga tahun 2021 garis kemiskinan di Indonesia mencapai angka Rp 502.730 untuk perkotaan, dan Rp 464.474 untuk perdesaan, Sedangkan di Jawa Timur sebesar Rp 459.440 untuk garis kemiskinan perkotaan, dan Rp 428.457 untuk garis kemiskinan perdesaan.

Sehingga apabila dilihat dari data tentang garis kemiskinan di atas, pertumbuhan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan naik atau turunnya garis kemiskinan. Karena dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk dapat mempengaruhi naik atau turunnya kemiskinan. Adanya jumlah penduduk yang tidak merata antara Kabupaten / Kota di Jawa Timur membuat sebagian dari daerah tersebut mengalami berbagai masalah ketimpangan sosial, salah satunya adalah tingginya angka garis kemiskinan. Apabila daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur memiliki angka garis kemiskinan yang tinggi, dapat dipastikan bahwa daerah tersebut akan mengalami banyak sekali permasalahan – permasalahan lainnya, seperti terhambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan angka kriminalitas dan menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Upaya dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pada tiga strategi program, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Saat ini terdapat lima kabupaten / kota di Jawa Timur yang menjadi daerah *pilot project* percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengusulkan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur melalui program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta program Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA).<sup>10</sup>

Selain pertumbuhan jumlah penduduk yang menjadi salah satu faktor pengaruh naik atau turunnya garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, juga terdapat beberapa faktor lain yang berpengaruh yaitu: tingkat pendidikan, pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dianggap oleh sebagian ahli ekonomi merupakan penghambat pembangunan. Mulyadi menyatakan bahwa tingginya angka pertumbuhan penduduk yang terjadi di negara sedang berkembang seperti Indonesia dapat menghambat proses pembangunan.<sup>11</sup> Sehingga tingginya pertumbuhan

---

<sup>10</sup> Safya Primadhyta, "1,7 Juta Warga Jatim Miskin Ekstrem" diakses dalam <https://www.cnnindonesia.com> pada 12 Maret 2023

<sup>11</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), hal

penduduk tanpa diimbangi dengan tingkat pendidikan yang mumpuni, maka dapat menyebabkan adanya kemiskinan yang tinggi serta menghambat pemerataan garis kemiskinan antar daerah di Provinsi Jawa Timur.

Tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa kini dan sekaligus persiapan bagi kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir<sup>12</sup>. Pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan, dan juga merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Apabila pendidikan kian maju dan berkembang dengan baik maka masa depan negara dan anak bangsa akan cemerlang, biasanya masyarakat yang miskin banyak mengalami kebodohan atau keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan karena kurangnya mendapat pendidikan.<sup>13</sup> dampak yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan maka akan berpengaruh terhadap garis kemiskinan melalui tingkat pengangguran yang tinggi.

Sukirno mengatakan efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi

---

<sup>12</sup> Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal 50

<sup>13</sup> Suropto, Lalu Subayil, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Periode 2010 – 2017, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Volume 1. Nomor 2. 2020*, hal 129

tingkat kemakmuran yang dicapai seseorang.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Edwards pengangguran terbuka adalah mereka yang mampu dan ingin bekerja, tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka, penduduk yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Sehingga dengan adanya tingkat pengangguran terbuka yang tinggi maka akan memperburuk dan menurunkan ketentraman masyarakat karena standar hidup yang rendah.<sup>15</sup>

Kemudian tingginya tingkat pengangguran terbuka akan berdampak pada rendahnya produktivitas penduduk, sehingga dapat memicu rendahnya nilai indeks pembangunan manusia. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi garis kemiskinan antar daerah di Provinsi Jawa Timur. Menurut Todaro dan Smith indeks pembangunan manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan.<sup>16</sup>

Menurut penelitian oleh Yohana Manik pada tahun 2019 bahwa Pengangguran, dan Pendidikan secara simultan berpengaruh signifikan

---

<sup>14</sup> Sardono Sukirno, *Ekonomi Makro Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 29

<sup>15</sup> Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hal 359

<sup>16</sup> Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 57

terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Tanjung Balai.<sup>17</sup> Kemudian penelitian Rapidah Azmi pada tahun 2019 bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu.<sup>18</sup> Serta penelitian Husnul Khatimah pada tahun 2021 bahwa Jumlah penduduk secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengangguran secara langsung tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas, ditunjukkan kemiskinan dapat dipengaruhi jumlah penduduk, pendidikan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia secara parsial. Dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi garis kemiskinan, digunakan variabel pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia secara bersamaan. Sehingga fokus pada penelitian ini menggunakan lokasi Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2021.

Berdasarkan penjelasan diatas dan penelitian terdahulu, terdapat faktor – faktor yang berbeda dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, serta pentingnya bahwa kemiskinan merupakan salah satu

---

<sup>17</sup> Yohana Manuk, “*Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kota Tanjung Balai*”, UIN Sumatera Utara : Medan, 2019

<sup>18</sup> Rapidah Azmi, “*Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Labuhan Batu*” UIN Sumatera Utara : Medan, 2019

<sup>19</sup> Husnul Khatimah, “*Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan*”, UIN Alauddin : Makassar, 2021

faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Maka dari itu dari itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik membuat judul penelitian yaitu **“Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia, Terhadap Garis Kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2021”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah, kemungkinan cakupan yang dapat diduga sebagai masalah, yaitu:

1. Banyaknya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial pada sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Adanya garis kemiskinan yang tinggi pada beberapa kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pada sebagian kabupaten / kota di Jawa Timur menjadi sedikit mengalami hambatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat diantara pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia yang berpengaruh secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
5. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh diantara pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran terbuka, dan indeks

pertumbuhan manusia secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terbuka secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia secara signifikan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian untuk menambah wawasan seiring berkembangnya ilmu- ilmu tentang pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan penduduk terhadap garis kemiskinan.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi garis kemiskinan.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini menjadi bahan acuan serta pertimbangan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan – kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, dengan memahami indikator yang mempengaruhi garis kemiskinan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dasar pengembangan pada penelitian selanjutnya dengan kajian masalah mengenai garis kemiskinan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang melebar dalam penelitian. Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus hanya kepada pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan, pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Objek penelitian yang digunakan adalah wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik (BPS).

## 2. Keterbatasan Penelitian

Batasan pada penelitian berfokus pada pengukuran pengaruh pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap garis kemiskinan di Jawa Timur tahun 2021.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Garis Kemiskinan

Terdapat tiga ukuran garis kemiskinan yaitu miskin, sangat miskin dan melarat yang diukur berdasarkan konsumsi per kapita per tahun setara beras sebanyak 480 kg, 360 kg dan 270 kg untuk daerah perkotaan dan 320 kg, 240 kg dan 180 kg untuk daerah pedesaan.<sup>20</sup> Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari US \$1 per hari (setara Rp8.500 per hari).

#### b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk.<sup>21</sup> Malthus mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan

---

<sup>20</sup> Sajogyo, *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Pangan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1996), hal 2

<sup>21</sup> Mulyadi, *Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2014), hal.99

dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai deret ukur. Sementara itu pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai deret hitung. Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian maka akan menyebabkan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan berimbas pada kemiskinan yang meningkat.<sup>22</sup>

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan suatu kegiatan seseorang dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk tingkah lakunya, baik untuk kehidupan masa kini dan sekaligus persiapan bagi kehidupan masa yang akan datang dimana melalui organisasi tertentu ataupun tidak terorganisir.<sup>23</sup> Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 yang membahas tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 Butir 1 (sebagaimana telah dikutip pada Bab XI) mengandung penegasan tentang muatan pendidikan, yaitu: pelaksanaan pendidikan diselenggarakan secara sadar dan terencana, pendidikan dilaksanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, suasana belajar dan proses

---

<sup>22</sup> Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi yang Perlu Anda Ketahui*, (Esensi Erlangga Group: Jakarta, 2015), hal.15

<sup>23</sup> Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal 50

pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan potensi peserta didik.<sup>24</sup>

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mampu dan ingin bekerja, tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk mereka, penduduk yang sedang mencari pekerjaan ataupun penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Sehingga dengan adanya jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan.<sup>25</sup>

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Preayitno, *Dasar Teori dan Praksis Pendidikan*, (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal. 385

<sup>25</sup> Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016) hal 359

<sup>26</sup> Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 57

## 2. Penegasan Operasional

### a. Garis Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis ialah pembatas antara penduduk yang dikategorikan miskin karena berada dibawah garis kemiskinan. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan<sup>27</sup>

### b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan mendatang. Laju pertumbuhan penduduk geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya.

---

<sup>27</sup> *Badan Pusat Statistik.*

$$Pt = (L-M) + (I-E)$$

Keterangan:

Pt : Pertumbuhan penduduk total

L : Angka kelahiran dalam satu tahun

M : Angka kematian dalam satu tahun

I : Penduduk yang masuk (imigrasi)

E : Penduduk yang keluar (emigrasi)<sup>28</sup>

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan merupakan pembelajaran, pengetahuan, keterampilan melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian.

Variable ini diukur dengan setiap jenjang Pendidikan.

d. Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah tingkat penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu bersamaan mereka tidak bekerja. Dengan rumus perhitungan

sebagai berikut:  $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ <sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Badan Pusat Statistik*

<sup>29</sup> *Badan Pusat Statistik.*

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. Adapun cara penghitungan IPM sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}^{30}$$

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Memudahkan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan Skripsi sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup serta batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pada penulisan.

Bab II : Landasan Teori. Pada bab ini berisikan tentang mulainya mengkaji teori yang didapatkan dari sebuah penelitian terdahulu. Dari sebuah teori-teori dan pembahasan mengenai variabel dan kerangka koseptual di penelitian.

Bab III : Metode Penelitian. Pada bab ini memuat pendekatan dan jenis pada penelitian, lokasi tempat penelitian dilakukan, dampel dan populasi, dumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian.

---

<sup>30</sup> *Badan Pusat Statistik,*

Bab IV : Hasil Penelitian. Didalam bab ini mengkaji isi data dalam rumusan masalah pada penelitian dan hasil analisis data pada objek dari sebuah pengamatan dan informasi yang digali.

Bab V : Pembahasan. Bab ini berisikan tentang pembahasan dari hasil pembahasan, kesesuaian teori – teori dan penelitian terdahulu.

Bab VI : Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan akhir dari penelitian skripsi dan dilengkapi dengan saran. Pada bab ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran, surat keaslian, dan daftar riwayat hidup.